



## DAKWAH DAN METODE PENGUATANNYA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI MASYARAKAT MILLENNIAL

**Umar Latif**

Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh  
[Umarlatif1945@gmail.com](mailto:Umarlatif1945@gmail.com)

**ABSTRAK:** Dalam perspektif pembangunan era millennial sekarang ini, dakwah dengan metode yang dipakai mestinya tidak lagi dipandang sebagai sebuah sikap yang subjektif, namun lebih mengarah kepada sikap kritis, yang kemudian mewadahi atas pembentukan asumsi-asumsi baru untuk dikembangkan. Pengembangan ini memerlukan langkah dan strategi secara konstektual dan dikonstruksi berdasarkan realitas kehidupan umat. Untuk itu, dakwah adalah tali-hubungan dengan tetap menawarkan *dialektis-komunikatif*. Artinya, pengetahuan dan pengalaman da'i harus bisa mengetahui gejala-gejala yang patut diberikan kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Dakwah, Metode dan Penguatan Masyarakat Millennial*

### A. Nilai Dakwah dan Etis-Spiritual

Banyak hal yang dapat diketengahkan mengenai fenomena dakwah. Apalagi jika diurutkan dalam kaca mata pembangunan. Dan biasanya, pandangan ini menuntut ragam solusi yang mengarah secara konstruktif, pun mengandung sikap kritis, yang kemudian mewadahi atas pembentukan asumsi-asumsi baru untuk dikembangkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tindakan ini biasanya, tampak seperti sebuah gerakan revolusioner; yang pada waktu tertentu dibenarkan, dan di waktu yang lain disalahkan. Kendati kemudian, keduanya menjadi pilihan yang sulit, namun paling tidak, salah satu nilai ini menjadi standar yang terpuaskan. Bahkan, diakui atau tidak, pembangunan mental manusia melalui pemahaman dakwah adalah prasyarat yang selama ini dianggap tabu. Sehingga secara metodologis, ilmu-ilmu sosial dipandang sebagai reaksi kultural yang menengahi polemik seputar penyebaran dakwah secara defensif untuk dipahami kepada masyarakat luas—terlepas pendekatan yang dilakukan itu bagaimana? Lihat misalnya Bassan Tibi, [terj.,] Misbah Zulfa Ellizabet, Zainul Abas, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 199-201. Lihat juga Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 109-114. Untuk itu, alasan utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan konsep dakwah di tengah-tengah masyarakat global—khususnya bagi da'i menurut penulis adalah; 1. Prinsip komunalitas, yakni pengetahuan agama milik segenap umat dan dimiliki secara bebas, tanpa harus mengkotomikan pengetahuan agama yang lain. 2. Prinsip universalitas, yakni kepercayaan pada agama

Upaya ini secara sederhana, hendak mencoba menggagas kembali pelbagai kesulitan dengan kontribusi "tali kesatuan umat" di era pembangunan, yang dalam hal ini dibangun melalui mekanisme dakwah. Bagaimanapun, seperti diketahui bahwa agama, dengan motif apapun yang hendak disampaikan tentu mengandung nilai interpretasi subjektif dan soliter. Sehingga terkadang, di era pembangunan, masyarakat terkesan memahaminya [agama; dengan penawaran dakwah] berarti mengorbankan pribadi secara totalitas, yang akhirnya menjurus ke arah pen-dogmatisan nilai agama.

Secara sederhana, metode serta aplikasi dakwah, dalam konteks sekarang, diharapkan bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat. Dakwah dengan berbagai pendekatan sebagai alasan untuk memberi *input* tersendiri atas ekspansi ajaran Islam. Melibatkan peran dan pola penerapan apapun walaupun bernuansa simbolik; apakah dengan bernyanyi, bermain musik, bersandiwara, dan seterusnya dalam nuansa etik-spiritual, jika niatnya mengarah pada keikhlasan atas nama agama, juga bagian dari perbuatan amal shaleh, sehingga melalui reaksi ini, terkadang akan menimbulkan serapan nilai edukasi (ekspresi, impresi, dan juga pemikiran) yang berguna untuk membangun etos dakwah.<sup>2</sup>

---

apapun jenisnya pasti sama—menuju Tuhan. Dan dengan demikian, kebenaran di dalamnya secara sederhana tentu tidak tergantung kepada si pembicara. 3. Prinsip ketakpamrihan, yakni setiap da'i dari agama apapun tidak boleh menjustifikasi bahwa penyampaian itu menjadi kepentingan pribadinya. 4. skeptisme yang teratur, yakni menunjukkan sikap tanggung jawab secara komprehensif dan menyeluruh bagi tatanan nilai yang berkembang dalam masyarakat.

<sup>2</sup>Mengenai dakwah sebagai aksi seni, entah dipahami sebagai alat maupun simbol, penulis kutip dari catatan Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 207. Lalu bandingkan dengan pola yang dikembangkan Nabi sejak masa Kerasulan [610-632 M], pada awal mula penyampaian wahyu Tuhan. Penyampaian wahyu Tuhan, dengan arti kata ber-dakwah, adalah pekerjaan yang dilakukan Nabi dengan 2 langkah. *Pertama*, dengan langkah sembunyi. Dan *kedua*, langsung dan terbuka. Kedua langkah ini merupakan bagian yang sama untuk memperkenalkan ajaran yang bisa membawa dunia dan akhirat ke arah yang lebih baik. Lihat A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1983), hal. 91. Lebih lanjut, bahkan tindakan tersebut merupakan perkara fenomenal. Di mana Nabi, yang hanya 22 tahun saja dalam membangun konstruk sosial yang baroe—sebuah waktu yang relatif singkat, mengalami kemajuan yang hebat. Karenanya, tipologi media dakwah yang diterapkan Nabi, seperti yang dijelaskan oleh Naguib al Attas, tak lain adalah konsep pendidikan dengan model pengajaran yang mudah dipahami untuk dipakai dalam kehidupan. Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, [terj..] Hamid Fahmy, M. Arifin, Ismail, dan Iskandar Amel, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al Attas*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 163 dst. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa aktivitas Nabi, dalam model pengajaran: al Qur'an (*yu'allimu 'I-Kitab*) merupakan hikmah dan pensucian umat yang mengarah pada manifestasi langsung atas metode dakwahnya. Namun, model

Praktek dakwah seperti ini harus dipahami sebagai bentuk aktivitas yang penuh hierarkis—yang aplikasinya dilakukan secara bersama-sama. Artinya, penataan dan pengembangan nilai-nilai syar'i di era pembangunan membutuhkan cara-cara yang sistematis. Beragamnya karakteristik dan meningkatnya kuantitas masyarakat menjadi suatu alibi, di mana realitas dan sarana dakwah harus dibangun dan dikelola secara sistematis. Mengingat performatisasi persoalan masyarakat semakin kompleks dan variatif, sehingga konsep yang ditawarkan harus berdasarkan singkatis masyarakat pembangunan; rasionalitas, pembebasan, dan perjuangan hidup yang Islami.

Budaya dan masyarakat cenderung memiliki konsep yang meluas. Selain itu, perubahan sosial dan budaya juga mempunyai kaitan sebab-musabab (unsur kausalitas) dengan faktor-faktor penentu (*defining characteristics*) dalam pandangan masyarakat. Dalam proses perubahan dan menajamnya arus pembangunan masyarakat, juga bagian dari sisi lain akibat reaksi fundamental yang menuntut kompleksitas, kemajuan, dan strategi kompetitif, di mana secara umum adalah satu fenomena multi-dimensi bagi masyarakat dan senantiasa berubah-ubah, baik dalam tatanan keluarga, industri, pekerjaan, pendidikan, dan petunjuk-petunjuk *streetipe* perubahan lainnya yang berkaitan dengan struktur sosio-ekonomi, politik, dan budaya.<sup>3</sup>

Konsekuensinya, dakwah harus siap menjadi suatu lembaga yang memiliki peranan dan alternatif yang solutif atas beragamnya reaksi sosial dalam pembangunan. Di samping media ini (dakwah) tetap menjalin hubungan secara harmonis, dengan meruaknya kerjasama secara aktif antara kerja dan ibadah dalam ruang *dialektis-komunikatif*. Alasannya, ideologi-ideologi pada masyarakat pembangunan hanya berdasarkan pada pemahaman dan asas globalisasi sebagai wujud responsif budaya material.

---

pendidikan tentu disesuaikan dengan kapasitas fisik, intelektual dan spiritual menurut kategori dan tingkatannya. Lihat juga al-Qur'an surat Ali 'Imran (3): 164 dan *al Jumu'ah* (62): 2; juga *al-Baqarah* (2): 129 yang bunyinya: "*Dia (Nabi Muhammad s.a.w) mengajar mereka dengan Kitab Suci dan hikmah dan mensucikan mereka*".

<sup>3</sup>Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 201-202.

Kepentingan pada arus pembangunan dapat mengakibatkan disposisi nilai dengan dalih beragamnya properti yang ditawarkan, sehingga hal ini akan senantiasa mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat di satu sisi, dan aktifitas kerja dan ibadah di sisi yang lain. Karenanya, bagi penulis, masyarakat sekarang dengan fenomena pembangunan, mereka cenderung memiliki predikat previlisasi dari ragam budaya material bahkan menjadi bagian dari makhluk yang bebas; bebas untuk melakukan sesuatu, bebas bertindak dan berpikir berdasarkan pada keyakinannya, dan juga bebas menentukan pilihan-pilihannya.

## **B. Peran Dakwah bagi Masyarakat Millennial**

M. Solly Lubis misalnya, mencoba menawarkan suatu pendekatan yang rasional atas peran dakwah, yang jika dibaca secara menyeluruh juga mengarah pada tahap pembangunan, yakni “Umat Islam dan globalisasi”. Menurut M. Solly Lubis, dua variabel ini memiliki daya jual yang inovatif dan senantiasa berkembang dalam masyarakat sekarang, di samping umat Islam termasuk bagian yang integral dalam era globalisasi masyarakat millennial.<sup>4</sup>

Bagi penulis, unsur tersebut memiliki indikasi yang kuat serta komprehensif atas peran dakwah dari segi pembangunan.<sup>5</sup> Lebih jauh lagi, sosiologi masyarakat

---

<sup>4</sup>M. Solly Lubis, *Umat Islam dalam Globalisasi*, (Jakarta: Insani Press, 1997), hlm. 31.

<sup>5</sup>Pendekatan pada ilmu sosiologi dapat memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena sosial yang sangat penting, dan telah matang berdasarkan pada proses rentang waktu yang panjang. Secara definitif, bahwa teori sosiologi adalah seperangkat proporsi yang memungkinkan untuk mensistematisasikan pengetahuan, penjelasan, dan peramalan tentang kehidupan sosial dan merumuskan hipotesis baru. Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* [terj.] Alimandan, dari judul aslinya *Modern Sociological Theory*, (Jakarta: Kencana, 2004), edisi Ke-6, hlm. 5. Itu sebabnya, mengapa pendekatan sosiologi menjadi rujukan dalam melihat fenomena dakwah di tengah-tengah gejala sosial di satu sisi dan pengaruh pencerahan di sisi yang lain (pengetahuan dan pengalaman). Hasan Shadily-- sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup, atau juga kepercayaan dan keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam setiap persekutuan hidup manusia. Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 1. Sedangkan Soerjono Soekanto mangartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membatsi diri terhadap persoalan penilaian. Bagi Soekanto, sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama. Sehingga dalam ilmu ini terdapat bagian-bagian sosial yang membutuhkan proses dinamika perihal struktur kemasyarakatan sebagai gambaran untuk memperoleh pengetahuan mengenai kehidupan bersama dari manusia. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 18 dan 53.

sekarang, di mana pembangunan yang terjadi kerap menawarkan pelbagai konsep dengan asas materialisme adalah perihal perilaku masyarakat kontemporer yang saling terkait dengan hal-hal kebendaan, baik secara pribadi, golongan atau kelompok bangsa. Sikap seperti ini membutuhkan penyaringan, dengan tidak mengandung kebencian berlebihan kepada "benda-benda pembangunan". Dengan demikian, sikap da'i hanya menjadi "mediator penentu" dalam mentransfer nilai-nilai agama [dakwah] dan bukan untuk memutuskan hasil pembangunan masyarakat dengan nada; benar atau salah, berasaskan Islam atau bukan. Bahkan kedudukan mereka sebatas sarana penyampaian ber-agama (*gharizah tadayyun*) untuk dimiliki oleh setiap orang dalam arti yang sesungguhnya.

Pengertian di atas, tentu mengandung efektivitas dan "nilai utama" dalam segala bidang aktivitas masyarakat. Apalagi aktivitas yang dilakukan mempunyai peran dan konsekuensi atas pengembangan dakwah dalam ideologi pembangunan. Pembangunan, dengan memperhatikan peran pengetahuan dan pengalaman sebagai jalan afirmasi pada pengembangan mental masyarakat, tentu membutuhkan suatu filosofi. Artinya, kecenderungan untuk mengembangkan dirinya dalam ruang kemajuan multi-dimensi (pengetahuan dan pengalaman berdasarkan teknologi) tetap menjadi bagian kolektivitas, dengan menempatkan sarana interaksi; di mana peran komunikasi dan transportasi adalah menu tunggal dalam pemahaman pembangunan.

Sebab, pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Habermas adalah suatu dialektika pencerahan.<sup>6</sup> Filosofinya, hanya untuk pembebasan manusia dari berbagai bentuk dominasi kekuasaan maupun hegemoni kesadaran, yang secara hakiki akan jatuh dalam pandangan dogmatisme baru. Dengan demikian, tingkah laku manusia tidak lagi dianggap sebagai subjek penelitian, tetapi menjadi objek yang dapat dimanipulasi secara teknis atau digunakan sebagai legitimasi teoritik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Heru Nugroho, "Kritik Habermas Terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan", [peng.,] Mohtar Mas'ood, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta: UII-Press, 1997), hlm. 92

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 93.

Tawaran Habermas di atas menjadi kerangka pikir (*instrumental*) atas sarana dakwah, di mana persyaratannya hanya untuk membangun jaringan secara konfidensial bagi masyarakat, dengan menerapkan pola *dialektika-komunikatif*. Hal ini tentu saja akan mereduksi kembali makna dan nilai kebebasan dalam pandangan pembangunan sebagai wujud pencerahan, dengan tidak memasukkan lebel intervensi dan tekanan bagi masyarakat yang bebas dari dominasi, dan dianggap sebagai hak jaminan formal untuk membentuk kesadaran komunal berdasarkan mentalitas Islami. Di samping juga menguatnya tekanan pada dataran komunikasi antar sesama masyarakat sebagai unsur pemberdayaan secara permanen dan bernilai kognitif. Yang akhirnya, tentu akan melahirkan kekuatan spiritual dalam bahasa dakwah (ilmu dan opini masyarakat) secara kontinyu.

Dengan demikian, akhirnya, konsep Habermas setidaknya mampu membongkar konsekuensi dan peran dakwah dalam wacana sosiologi pembangunan; dengan beranggapan bahwa kata “pembangunan” cenderung menjadi kemitosan dan mengalami sakralitas atas nilai dan makna, kebutuhan dan kewajiban, subjektifitas dan objektifitas, urgensi dan harapan.<sup>8</sup> Memang, pembangunan menawarkan keuntungan dan properti yang besar bagi masyarakat. Namun, penawaran tersebut hanya menempatkan posisi masyarakat pada ruang yang ambigu, di mana karakter dan emosional sosial-masyarakat terkadang bersifat abstrak. Artinya, nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada pembangunan seolah-olah membutuhkan pengorbanan secara signifikan atas berbagai dimensi kemanusiaan.

Sehingga persoalan ini lambat-laun menjadi hierarkisitas “nilai” dalam membangun metode-metode dakwah bagi masyarakat. Alasannya, dakwah yang dianggap suatu nilai yang positif cenderung mendapat tekanan, dengan beragamnya pertanyaan yang berbuntut agitatif seperti; metode atau konsep dakwah yang dibangun dalam dunia pembangunan, yang nilai kebenarannya menurut siapa, atau lembaga struktural (dakwah) berada pada lapisan yang mana, atau bahkan objek atau sasaran

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 97.

(siapa atau kelompok) mana yang harus dibimbing, kalau tidak dikatakan untuk dikorbankan.

Komposisi dan argumentasi yang berbasis agitasi di atas tentang pemahaman dakwah, bagi penulis, tentu harus dipahami melalui “relativitas budaya” sebagai wacana yang solutif atas kepentingan dakwah dalam pandangan pembangunan. Upaya pada pendekatan budaya, secara sederhana hanya untuk memahami kembali realitas dakwah dengan menempatkan pada ruang pembangunan masyarakat. Pembangunan seperti yang telah penulis gambarkan di atas, tentu membutuhkan suatu legitimasi pembebasan masyarakat terhadap target-target tertentu—yang dasarnya adalah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah berdasarkan dengan cita-cita Islami.

Karakteristik ini yang memberanikan penulis untuk menempatkan relativitas budaya sebagai sesuatu yang berbentuk argumentatif, terbuka, akomodatif, bahkan juga mengandung nilai selektif. Bagaimanapun, karakteristik seperti ini tentu saja membutuhkan kemampuan *dialektika komunikatif*. Sebab proses patologi pembangunan, dan dakwah sebagai sarana komunikatif harus sama-sama berasumsi bahwa dalam masyarakat cenderung bersifat kooperatif, merdeka dan bebas. Dan masyarakat, dengan tingkat intelegensia pengetahuan yang bernilai bebas, jangan serta-merta menutup diri dalam pembentukan dialektika antara unsur rasionalitas pada satu sisi dan komunikatif di sisi yang lain.<sup>9</sup>

Untuk manambah nilai utama peran dakwah, maka icon rasionalitas yang dibangun melalui komunikasi adalah aspek yang sangat diperlukan sebagai landasan berpikir. Rumusan ini agar tidak mendikotomikan pesan-pesan dakwah yang memiliki nilai keilahian—akhirnya bisa terperangkap dalam konteks sekulerisasi yang absolut. Banyak di kalangan muslim yang mencoba membangun citra Islami di tengah-tengah pertempuran budaya—pada akhirnya hanya menentukan pemisahan antara kebutuhan manusia dengan Tuhan, hubungan dunia dan akhirat, manusia dengan manusia, atau antara ibadah dengan unsur mu’amalah.

---

<sup>9</sup>David Kaplan dan Albert A. Manners, [peng.,] P.M. Laksono, *Teori Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.149.

Padahal kalau dikaji lebih jauh, Islam dengan dakwahnya adalah sebuah paradigma terbuka. Ia merupakan mata rantai dan sejarah peradaban politik dunia. Itu artinya, Islam merupakan warisan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Dan belajar banyak tentang pembangunan masyarakat dengan menggunakan konsep-konsep Yunani-Romawi di Barat; Persia, India, dan Cina di Timur. Peran struktur sosial dari berbagai budaya dan peradaban menjadi standar penentu atas kemajuan Islam saat itu. Konseptualisasi struktur sosial dalam masyarakat Islam, yang kemudian melahirkan pengaruh dan peradaban baru dalam dunia globalisasi pembangunan. Sehingga fenomena-fenomena ini yang akhirnya memudahkan ajaran Islam (dakwah) merasuk dalam tindak sosial, interaksi sosial, dan perilaku peran dalam masyarakat pembangunan.<sup>10</sup>

Anggapan bahwa dakwah telah menjadi kekuatan dan legalitas bagi seluruh alam manusia, maka sasarannya mesti dibaca sebagai pembentukan pemahaman dengan latar belakang emosi keagamaan, dan sekaligus memancing manusia untuk tetap menggunakan akal, otoritas, intuisi (wahyu), dan indera sebagai alat pembenaran mutlak yang bernilai universal dalam satu kesatuan spiritual. Kesatuan ini, secara sederhana, memerlukan beberapa sikap untuk diperankan bagi masyarakat secara komprehensif, di antaranya;

*Pertama*, menunjukkan bahwa Islam agama pembawa rahmat sekaligus Islam sebagai pembawa perdamaian. Sehingga hal ini mampu melahirkan kepekaan atau juga kecintaan masyarakat terhadap ajaran Islam berdasarkan konseptual (Al-Qur'an dan Hadits), yang didukung dengan berbagai persepsi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 290-291. Lihat juga Syamsuddin Arif, "Sains di Dunia Islam: Telaah Historis-Sosiologis", *Islamia*, "Membangun Peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan", Thn I No. 6, Juli-September 2005, hlm. 87.

<sup>11</sup>Lihat Al-Qur'an yang menyuruh umatnya untuk memeluk agama Islam, seperti Q.S. Al-Baqarah; [2]: 132, 208, atau Q.S. Ali Imran; [3]: 102, Q.S. Az-Zumar; [39]: 54, dan Q.S. Al-Haji; [22]: 34.

*Kedua*, memberikan pengertian berdasarkan epistemik tentang ajaran-ajaran Islam, di mana konsep pembawa rahmat berkaitan langsung dengan berbagai dinamika dan problematisasi dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak bisa dihindari seperti; kemerdekaan, beragama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

*Ketiga*, menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam terdapat pondasi yang kuat atas rasa persaudaraan dan kesatuan sebagai wujud kebutuhan primer untuk menjamin adanya ketentraman serta melahirkan kemajuan bersama.

*Keempat*, bahwa ajaran Islam juga mengandung pemahaman tentang kreatifitas (perbuatan untuk lebih produktif), motivatif (cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspeknya), sublimatif (perbuatan manusia tidak hanya dalam bidang keagamaan melainkan bersifat keduniaan), integratif (mampu mempersatukan cara pandang manusia dalam menghadapi tantangan pembangunan).<sup>12</sup>

Aspek-aspek di atas tentu saja lahir melalui icon komunikasi. Maka peran da'i ketika berada di tengah-tengah masyarakat harus mampu menjustifikasikan simbol bahasanya sebagai wujud pengetahuan bagi masyarakat. Begitu juga dengan realitas ajaran Islam yang ditawarkan, tentu harus berdasarkan "terjemahan" masyarakat (sesuai dengan situasi dan kondisi) dalam ruang lingkup yang dinamis. Pesan dakwah; bagaimanapun motif, metode, konsep atau pandangan yang dibangun tentu tidak terlepas dari peminjaman dan pengembangan sebagai proses dialektika internal. Untuk dapat memahami interaksi sosial yang berkembang, maka da'i dengan sendirinya harus mampu memilih-memilah dalam menentukan kualitas pemahaman komunikasi dakwah sebagai warisan yang otentik.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, pemahaman komunikasi, seperti yang ditawarkan oleh S. Takdir Alisjahbana adalah prosesi dan sarana yang sangat komunikatif untuk membangun ikatan sosial sebagai wujud penyebaran, baik pengetahuan atau pengalaman tertentu

---

<sup>12</sup>A. Fauzie Nurdin, "Peranan Pemimpin Agama dan Modernisasi dalam Pembangunan", dalam Abdurrahman, dkk. (ed.) *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993); Lihat Juga Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), hlm. 145.

<sup>13</sup>*Ibid*

bagi masyarakat.<sup>14</sup> Dalam kelompok masyarakat-religius, tentu sarananya adalah bahasa dakwah. Bahasa dakwah menjadi ukuran bahkan patokan nilai yang mampu mempersatukan manusia dalam mengelola sumber ajarannya.

Membangun tingkat pemahaman agama [dakwah] melalui komunikasi bahasa, berarti mencoba "melembagakan" pelaksanaannya terhadap perilaku masyarakat. Pesan melalui bahasa yang diberikan oleh si da'i harus bisa mempengaruhi perilaku masyarakat secara simbolik—terlepas bentuk perilaku masyarakat itu dibangun dengan simbol isyarat, atau bentuk lainnya; seperti cara tersenyum, berpakaian, tutur kata, pandangan mata, atau bahkan anggukan kepala sekalipun, harus mampu dijadikan sebagai pengaruh dan kekuatan dalam membangun dakwah. Oleh karena itu, maka para penda'i harus tetap konsisten dengan pesan-pesan yang digunakan untuk mengkomunikasikan "sesuatu" kepada seseorang, di antaranya adalah;

- a. Pertumbuhan kualitas. Artinya, para da'i memiliki kualitas atau kemampuan pribadi dalam mengorasikan dirinya sebagai sosok yang berkharismatik. Hal ini bukan berarti, pembahas membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Tapi cenderung pada pertumbuhan pribadi dengan kualitas spiritual, kualitas moral, kualitas intelektual, dan kualitas iman. Begitu juga dengan komparasi dalam skala yang lebih besar, di mana (lembaga struktural) menjadi standar pengetahuan tertentu bagi masyarakat, dan dianggap mumpuni dalam menjembatani kegiatan sosial dengan kegiatan keagamaan.
- b. Pertumbuhan kapasitas. Bagi masyarakat kontemporer, terkadang, nilai-nilai pragmatis dalam ajaran Islam menjadi rujukan atas pemberdayaan secara logis, dan mampu dipahami secara gamblang atas reaksi agama. Atau, bagi mereka agama (konsep dakwah) hanyalah alat secara simbolik dalam mengenal agama. Oleh sebab itu, penekanan pada metode dakwah harus berdasarkan ruang *dialektis-komunikatif*.
- c. Nilai bahasa. Di sini para da'i harus mengkonfirmasi bahasa yang tepat bagi masyarakat. Sebab bagaimana pun, masyarakat terkadang mengalami

---

<sup>14</sup>S. Takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru; Nilai-nilai Sebagai Tenaga Integrasi dalam Pribadi, Masyarakat dan Kebudayaan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1966), hlm. 131. Sedangkan kata komunikasi sendiri adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung secara tatap muka maupun tak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, atau perilaku. Lihat Onong Uchjana, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 60.

kegagalan ketika menterjemahkan dirinya dalam ruang dialektika keagamaan dengan realita kehidupan sehari-hari. Tepatnya, bagi mereka, bahasa harus bisa menjadi praktik sosial.

Para da'i dengan konsep bahasa yang gamblang harus dapat menentukan; mana yang berlaku untuk umum dan mana yang berlaku secara khusus, mana yang bersifat pengertian (interpretasi makna) dan mana yang berbentuk pertimbangan kompetensi (autensitas). Sebab keduanya baik makna dan autensitas dakwah sama-sama terkait dengan masalah sumber (asal usul instruksi)—yang dalam hal ini bagi penulis, bagaimanapun melibatkan penyeimbangan yang sulit untuk dialihkan secara sepihak, yakni sang agen dakwah (da'i). Tapi jika dibaca secara abstrak, keinginan tersebut bukan kepentingan si da'i, melainkan perintah Tuhan. Sehingga transformasi konsep dakwah, pada akhirnya, mampu menerangkan bagaimana cara yang ilmiah untuk menghindari kerusakan di muka bumi atau bekerja secara maksimal berdasarkan ridha Tuhan. Atau bagi masyarakat, konsep dakwah bukan untuk menyempitkan cakrawala mereka dalam bentuk emosi keagamaan dan keterpencilan interaksi sosial.

Dalam tulisan Suma Riella Rusdiarti, di mana peran bahasa seperti yang ditawarkan oleh Pierre Bourdieu adalah sesuatu yang bertindak otonom. Dia tidak menerima pemisahan melainkan bergerak maju dan bersifat simultan. Seorang pelaku sosial; katakanlah dia penda'i tentu memiliki ruang yang bebas dan segudang otoritas, ketika dia mengkomunikasikan dirinya dalam kelompok sosial, maka dia sedang memanasifasikan otoritasnya. Otoritas ini bagian dari institusi yang memerlukan efektivitas performatif pelaku (seperti ruang dan waktu) yang harus ada agar setiap argumentasi benar-benar efektif.<sup>15</sup>

Dengan menempatkan bahasa dalam ruang *dialektika komunikatif* sebagai sarana dakwah secara kongkret, maka nilai-nilai tersebut harus memiliki ruang bias dengan menekankan pada aspek moralitas dan metode berpikir Islami, cara hidup yang menyeluruh (*Din al-Kamilah*), bahkan tidak ada pemisahan antara aspek kehidupan

---

<sup>15</sup> Suma Riella Rusdiarti, "Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan", *Basis*, "Kritik Terhadap Neo-Liberalisme" No. 11-12, Tahun Ke-52, November-Desember 2003, hlm. 31-34.

dengan aspek agama. Karenanya, peran dakwah seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat adalah hanya sebagai wujud atas reaksi sosial dengan beragam fenomena yang datang silih berganti, yang kemudian dirangsang keberadaannya oleh nash-nash agama. Nash-nash tersebut dapat dikaji secara empiris terutama pada aspek penyampaian (perbuatan observasi dan perbuatan bermakna) melalui media dakwah atau bentuk internalisasi nilai agama bagi para penda'i.<sup>16</sup>

Perbuatan observasi dan perbuatan bermakna dalam arena dakwah merupakan manifestasi unsur-unsur komunikasi yang harus dimiliki oleh setiap penda'i. Sebab unsur-unsur komunikasi tentu akan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan khusus bagi para da'i dalam merealisasikan fenomena-fenomena dakwah di mata ideologi pembangunan, di antaranya ada beberapa unsur seperti yang disebutkan oleh Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat;

*Pertama*, sumber (*source*). Para da'i harus memiliki ketrampilan dalam melakukan komunikasi berdasarkan pada pengetahuan, dengan tujuan berbagi pengalaman atau untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. *Kedua*, penyandian (*encoding*). Di sini para da'i bekerja dalam ruang privatisasi seseorang untuk menentukan perilaku baik secara verbal atau non-verbal. Hal ini hanya untuk dapat mengetahui perkembangan masyarakat tertentu, baik adat, norma-norma, bahasa, atau bidang ketrampilan lainnya guna menciptakan suatu pesan moral keagamaan. Dan yang terakhir adalah saluran (*channel*). Konsep ini dituntut para da'i untuk menjadi perantara atau penghubung pesan moral agama bagi masyarakat (sumber dan penerima). Kendati masih banyak unsur-unsur lainnya yang diketengahkan dalam realita kemampuan para da'i.<sup>17</sup>

### C. Kriteria yang Dibangun

---

<sup>16</sup>Jalaluddin Rahmat, *Ilmu Dakwah dan Kaitannya dengan Ilmu-ilmu Lainnya*, (Semarang: Seminar, 1990), hlm. 4.

<sup>17</sup>Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antar Budaya; Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 14-15.

Ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan mengenai dakwah dalam dataran pembangunan, dan kaitannya dengan relativitas budaya masyarakat sebagai perihal pembentukan mental masyarakat, di antaranya;

- a. Latar belakang pendidikan. Artinya, masyarakat dengan beragam interaksi sosial memiliki peran dualisme: menguasai dan dikuasai. Mereka wujud ordamen dan mitra yang bebas. Pendidikan adalah sarana totalitas untuk memilih dan menilai kebenaran hakiki yang memungkinkan untuk menciptakan pembangunan. Di sini, kita bisa saja membuat perumpamaan, dengan menggambarkan fenomena dan gaya hidup seperti; potret Rasul, Mahatma Gandhi, Bunda Maria, Ramakrishna, atau bahkan nama-nama seperti Hamzah al-Fansuri, al-Din Al-Sumartani, syekh Ar-Raniry, Kihajar Dewantara, Hartika Kartini, Cut Nyak Dhien, dan tokoh-tokoh lainnya. Alhasil, karakteristik ini kerap melahirkan kepekaan dan ikatan emosional.

Secara sederhana saja, pendidikan juga berangkat pada hal yang sama, yakni sebagai motor dakwah dalam mengembangkan nilai-nilai Islam, seperti yang terdapat dalam wahyu pertama.<sup>18</sup> Makanya, pengembangan pendidikan dengan berorientasi pada metode, kurikulum, sarana, lembaga, serta tujuannya misalnya, adalah sikap yang dianggap kritis, juga dikatakan membangun atas pembentukan mental masyarakat.<sup>19</sup>

- b. Bidang agama. Secara teoritis, agama adalah peradaban. Dalam catatan H A.R. Gibb, "*Whither Islam*", memberikan suatu gambaran di mana; "*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization*" (Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama, melainkan ia adalah sebuah peradaban yang sempurna).<sup>20</sup> Indikasinya, keberadaan agama bagi para da'i akan mengukuhkan dirinya dalam ruang selektif.

Sebab, ekspresi mereka (da'i) dalam kehidupan sehari-hari memiliki imej komunikatif bagi masyarakat. Budaya material, prilaku, moralitas, dan unsur-unsur intrinsik lainnya menjadi teladan tersendiri dalam komunitas masyarakat. Ketika ekspresi seorang da'i terhadap pembangunan mental berkurang, maka masyarakat akan menilai bahwa tindakan itu bagian dari pembodohan. Begitu juga sebaliknya, ketika

---

<sup>18</sup>Q.S. *al-Alaq*; 96: 1-5

<sup>19</sup>Muhammad Quthub, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1984), hlm. 324-374. Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, seri terjemahan, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 255-260.

<sup>20</sup>M. Natsir, *Capita Selecta*, (Bandung: N.V. W. van Hoeven, Tanpa Tahun), hlm. 14.

da'i terlalu berlebihan dalam merespon bentuk pembangunan, juga masyarakat akan menilai tindakan itu menjadi *a priori* sesat. Perlu penulis bedakan dalam hal ini, bahwa interpretasi seperti ini terkadang menjadi dilematis—tapi yang terpenting bagaimana memposisikan tindakan da'i seperti ini dalam dua katagori; antara tindakan da'i sebagai wujud peradaban dengan tindakan da'i sebagai wujud budaya.

Pemisahan ini bukan berarti mencari pengaruh teritorial geografis si da'i, tapi lebih kepada bahaya agitasi dan affiliasi makna yang dibangun masyarakat terhadap tindakan (ekspresi) da'i. Dalam catatan Effat Al-Sharqawi misalnya, budaya dan peradaban mengandung perbedaan. Dikatakan budaya disebabkan adanya bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan bentuk kemajuan mekanis dan teknologis erat kaitannya dengan peradaban.<sup>21</sup> Aplikasi budaya cenderung mengedepankan nilai-nilai dalam bentuk seni, sastra, religi (agama), dan moral, maka peradaban meliputi sistem; seperti politik, ekonomi, hukum, dan bentuk-bentuk aplikatif lainnya. Makanya kedua ekspresi si da'i di atas, ketika merespon pembangunan sosial membutuhkan tali bahasa yang tepat; siapa yang mereka (da'i) maksudkan, atau budaya pembangunan yang mana yang mereka maksudkan ?

Untuk itu, M. Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa masyarakat terkadang tidak memahami tentang esensial dirinya. Kendati mereka berada pada wilayah budaya keagamaan. Mereka memahami tentang Al-Qur'an, menjalankan rukun Islam, mendengar ceramah, atau bahkan mereka masih mengikuti tradisi-tradisi keislaman, seperti *Isra' Mi'raj* atau *Nuzul al-Qur'an*, namun ketika mereka berada dalam ruang publikitas dengan beragam corak dan budaya yang berkembang, maka mereka tidak meyakini bahwa hal tersebut juga bagian dari teks al-Qur'an. Hal ini tentu saja disebabkan oleh pemahaman dan pengkajian teks-teks al-Qur'an hanya sebatas pengetahuan tanpa adanya dasar-dasar autentik mengenai Islam sebagai sejarah atau Islam sebagai cita-cita yang mendasari dalam jiwanya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Effat Al-Sharqawi, *Filsafat Kebudayaan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 5

<sup>22</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 14-15. Lihat Juga komentar Syafi'I Ma'arif dalam catatan Fred. R. Von der Mohden, "Islam dan Negara di Indonesia dan Malaysia" dalam bukunya Harun

Jika fenomena dakwah di atas dianggap sebagai sistem, dan da'i sebagai motor moralitas bagi masyarakat, maka upaya untuk menciptakan iklim keagamaan akan berjalan dengan baik. Seperti; penjelasan ide-ide agama bagi masyarakat secara positif, kemudian korelasi agama secara definitif mengenai situasi dan kondisi masyarakat pembangunan, dan yang terakhir adalah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya beragama sebagai penyeimbang kehidupan mereka, di samping pengetahuan agama lainnya sebagai mitra bersama di era pembangunan.

- c. Bidang sosial. Untuk mengambil sebuah sampel tentang dinamika dakwah, baiknya melihat peran keluarga sebagai mesin terkecil dalam membangun jaringan kehidupan dan peradabannya. Di sini, keluarga memainkan peranan yang sangat signifikan dalam mengembangkan pola pikir anak selama periode-periode formatif dalam kehidupan. Bahkan peranan keluarga dalam memberikan persetujuan, dukungan, ganjaran, dan hukuman bagi anak termasuk justifikasi penggunaan bahasa. Ini bukan berarti bahwa keluarga melakukan pemaksaan kehendak melainkan hanya untuk membimbing dan mengarahkan pada konsekuensi nilai anak yang akan dikembangkan berdasarkan pada tujuan anak. Begitu juga dengan peran para da'i.

Mereka seperti yang telah penulis jelaskan di atas harus mampu menganalogikan fenomena-fenomena masyarakat sebagai penerima dakwah. Sebab, masalah masyarakat hendaknya dipelajari sebelumnya, dan peran bahasa tentu menjadi objektif untuk dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang agama. Oleh karena itu, dalam buku Hamzah Ya'qub, memberikan klasifikasi pembagian tentang fenomena masyarakat menurut tingkat pikirannya.<sup>23</sup> Dan di mata penulis hanya tertuju pada masyarakat yang berpikir kritis. Golongan masyarakat ini adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah ideologi pembangunan, di mana tingkat pengetahuan dan pengalaman bagian dari kebiasaan sehari-hari. Untuk itu, para da'i harus bisa menjelaskan mana pemahaman agama secara sosiologis dan mana pemahaman agama secara teologis.<sup>24</sup>

---

Nasution & Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 122.

<sup>23</sup>Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam; Teknik Dakwah dan Leadership*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 33.

<sup>24</sup>Bustanuddi Agus, *Agama Dalam...*, hlm. 208-209.

Pendekatan yang dilakukan di atas, bagi penulis, bahwa kriteria-kriteria dakwah dalam pembentukan mentalitas Islami yang dibangun, tentu masih jauh dari responsitas budaya masyarakat yang hidup di tengah-tengah ideologi pembangunan. Namun di satu sisi, barangkali kita telah menempatkan pemahaman agama secara objektif tentang kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam membangun materi-materi dakwah dalam ranah pembangunan. Dakwah di tengah problematika sosial, tampaknya harus tetap konsekwen dengan nilai-nilai “keadilan” dan “toleransi”. Sebab, ke dua kata tersebut akan mempengaruhi kinerja para da’i dalam melakukan orasi di tengah-tengah masyarakat yang sarat dengan ragam budaya.

Prinsip-prinsip keadilan dan toleransi banyak dijelaskan dalam ruang lingkup normatif.<sup>25</sup> Tentu saja hal ini untuk membangun cara pandang masyarakat serta pemahaman mereka atas peran dakwah dalam masyarakat pembangunan secara optimal oleh para da’i. Hubungan para da’i dengan masyarakat secara harmonis akan menentukan kelakuan sosial yang dinamis, serta terbentuknya sistem nilai dan norma agama secara spesifik dengan kelompok sosial yang konsisten. Keseriusan dan kekosistensi da’i dalam masyarakat pembangunan juga akan memungkinkan lahirnya kerjasama yang baik berdasarkan pada karakteristik dan identitas masing-masing pihak. Konsekuensinya, bahasa menjadi alat yang kompleks untuk menyerukan masyarakat pada budaya-budaya milleniariasme (keagamaan).

#### **D. Sikap Profesionalisme Da’i serta Metode Penerapannya**

Bila bahasa menjadi elemen epistemologi da’i di tengah-tengah masyarakat menjadi penting, maka da’i mau tidak mau, juga memerlukan sinergi yang bebas dari divergensitas tempat dan waktu. Kematangan dan sikap profesionalisme da’i ketika

---

<sup>25</sup>Hal ini bisa dilihat dalam beberapa surat yang membicarakan sikap toleransi dan solidaritas bersama, seperti; Q.S. ar-Ra’d; [13]: 22, “Dan mereka itu menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)”. Sedangkan dalam surat yang lain, seperti; Q.S. al-Furqan; [25]: 63, “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik”. Dan yang terakhir, seperti dalam surat Q.S. al-Baqarah; [2]: 109, “Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya”.

berada dalam ruang realitas masyarakat—tempat di mana semua orang berkumpul, berbincang tanpa mengenal limitasi atau restriksi moral berdasarkan agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin adalah perihal yang mesti diterjemahkan secara bijak. Mereka tidak lagi berdiri berhadapan dengan ajaran Tuhan, melainkan berjumuk dengan penuh intrik komunal masyarakat. Dan itu artinya, bagaimana mereka membicarakan secara respektif budaya masyarakat itu dengan realita yang dibaca bersama.

Untuk itu, sikap dan karakter da'i dalam merespon budaya masyarakat seperti itu menjadi pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan—agar persoalan dakwah dalam perspektif sosiologi pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Sebab bagaimanapun, jika pemahaman da'i atas budaya masyarakat seperti itu dibangun secara sempurna, atau paling tidak mampu membaca keinginan masyarakat, maka sangat tidak mungkin—menurut penulis, ajaran dakwah yang hendak disampaikan kepada masyarakat mengalami paradoksal. Lebih singkat lagi, penulis di sini bermaksud mencoba mempertanyakan profesionalisme si da'i; Apakah si da'i memiliki gaya bahasa "keagamaan" itu yang sifatnya universal untuk semua pemirsa, seperti "bahasa universal" musik yang ditayangkan di pelbagai TV, atau bahasa Telenovela yang dikemas sedemikian rupa sehingga membuat para remaja dan kaum ibu-ibu dapat mengurai air mata. Atau dengan kata lain, mampu dipahami oleh seluruhnya ?

Dengan tidak mencari formasi propaganda sepihak, yakni atas nama da'i, maka dialektika bahasa harus menjadi motor penentu terjalannya hubungan komunikasi antara da'i dan masyarakat dalam segala ruang dan waktu. Seorang da'i dengan kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki harus mampu mengintegrasikan dirinya dalam ruang komunikatif antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oleh karenanya, bahasa da'i tentu akan menggambarkan serangkaian kecenderungan makna dan nilai untuk direspon oleh berbagai kalangan masyarakat. Mereka (masyarakat), kendati hidup dengan alam yang merdeka, bebas, dan rasional tentu memiliki ruang pemahaman yang sempit tentang ajaran Islam, sehingga para da'i dituntut ekstra keras ketika menyampaikan misi dakwah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung pengertian jelas.

Di samping penguasaan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat juga bagian yang berlangsung dalam kontak fisik dan kontak sosial. Artinya, ketika para da'i mencoba berinteraksi dengan masyarakat, maka interaksi tersebut tidaklah terisolasi, dia hidup dan berkembang secara permanen dalam lingkungan fisik tertentu dan dinamika tertentu. Lingkungan fisik meliputi objek-objek para da'i secara verbal seperti; pakaian yang dipakai, bahasa tutur yang digunakan, keadaan dan suasana tempat tinggal para da'i, serta objek-objek fisik lainnya yang akan menimbulkan reaksi tersendiri bagi masyarakat, dan bahkan akan mempengaruhi komunikasi.

Begitu juga dengan kontak sosial, di mana hubungan keduanya akan membentuk suatu ikatan emosional yang positif antara da'i dan masyarakat, jika praktik sosial yang dibangun tidak berlandaskan pada perbedaan klasik; dirinya sebagai subjek dan diri mereka sebagai objek, dirinya sebagai superior dan diri mereka sebagai inferior. Akibatnya, kecenderungan-kecenderungan seperti ini yang akan melahirkan praktik-praktik, persepsi, asumsi, dan bahkan perilaku yang ganjil kalau tidak dikatakan negatif dari masyarakat. Sebab, secara geografis mereka (para da'i) adalah orang-orang panutan dan teladan untuk tidak dipertanyakan kembali otoritas yang melatarbelakanginya. Mereka juga filter bagi masyarakat dalam memahami persepsi keagamaan, untuk kemudian melahirkan praktik sosial yang terus berlangsung dalam dunia pembangunan.

Untuk itu, geografis bahasa komunikasi yang digunakan oleh para da'i dikatakan bersifat religius, jika seandainya; Pertama, interaksi sosial yang dibangun oleh da'i adalah religius, seperti persoalan-persoalan keilahian, kenabian, dan masalah-masalah yang menyangkut dengan kerja dan ibadah, atau bahkan nilai-nilai profetik ideologikal lainnya. Kedua, pesan-pesan yang akan disampaikan harus berdasarkan pada suhu dan kondisi masyarakat tertentu, baik berupa interpretasi-normatif (ayat atau Hadits) atau berupa pengetahuan dan pengalaman para da'i. Ketiga, metode bahasa yang mudah dipahami dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan toleransi dalam masyarakat pembangunan. Dan yang terakhir adalah, kejujuran, integritas, serta

memiliki komitmen yang lebih agamis atas beragamnya kemungkarannya dalam masyarakat pembangunan.

Konkretnya, profesionalisme para da'i menjadi kunci peningkatan intensitas pemahaman masyarakat tentang dakwah. Dan profesionalisme ini meliputi beberapa faktor, dan di antaranya; *Pertama*, komunikasi itu harus dilandasi dengan beragam keunikan agar masyarakat tidak mengalami kejenuhan. *Kedua*, komunikasi harus bersifat interaktif. Artinya, para da'i mampu merespon berbagai persoalan mereka dengan tidak mempengaruhi unsur-unsur lainnya dalam kehidupan mereka. *Ketiga*, komunikasi yang ditawarkan oleh para da'i harus menjadi pelajaran bagi mereka. Barangkali mungkin saja seperti itu alternatif yang mesti dilihat, bahwa bahasa merupakan salah satu unsur penyambung ukhwah antar agama—terlebih lagi pembangunan adalah alat yang mampu menyatukan masyarakat secara menyeluruh.

## **E. Kesimpulan**

Secara garis besar bahwa tujuan dasar kegiatan dakwah adalah memberi simulasi pengetahuan dalam konteks etis-spiritual. Orientasi dalam konteks ini, sesungguhnya direalisasikan melalui bahasa; dan bahasa di samping bersifat subjektif (bebas nilai) juga mengandung sisi soliter. Oleh karena itu, agar bahasa dakwah mengarah kepada tingkat ke-objektivitas-annya, maka langkah-langkah tersebut di antaranya adalah;

*Pertama*, memiliki kesadaran tentang perubahan. Jadi, nilai pendidikan dan pengajaran berdasarkan kegiatan dakwah tidak hanya milik para ulama saja, melainkan termasuk di dalamnya para intelektual. Bahkan pendidikan dan pengajaran, tidak hanya dibangun berdasarkan tempat yang formal, seperti; sekolah, universitas, mimbar, atau seminar-seminar, pun bisa melalui media. Tuntutan ini juga disebabkan oleh perubahan persepsi masyarakat dari waktu ke waktu.

*Kedua*, memiliki kesadaran kolektif. Sekali pun ini bisa dipahami bahwa perbuatan manusia hanya dapat mempertanggung jawabkan sendiri di depan Tuhan, namun setidaknya kesadaran seperti ini bisa ditanggulangi berdasarkan "dalam isi",

yakni substansi masyarakat, sehingga apa pun jenis kelompok masyarakat tetap komitmen pada tujuan yang sama, yakni menyuarakan agama-dakwah.

*Ketiga*, memiliki kesadaran tentang perlunya objektifikasi. Ini hanya bertujuan membangun bagaimana nilai-nilai dakwah yang diterapkan harus lebih pluralis juga sistematis dalam areal ilmu dan pengetahuan. Sebab, kecenderungan pada kesadaran ini adalah menentukan sebuah sikap dan pandangan masyarakat yang begitu kritis dalam menilai dan memahami, baik dari dimensi sosial, budaya, politik dan sejarah yang sering dianggap berbeda-beda. *Walla 'Alam*.

### Daftar Bacaan

- A. Fauzie Nurdin, "Peranan Pemimpin Agama dan Modernisasi dalam Pembangunan", dalam Abdurrahman, dkk. (ed.) *Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al Husna, 1983
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia; Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Bassan Tibi, [terj.,] Misbah Zulfa Ellizabet, Zainul Abas, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antar Budaya; Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- David Kaplan dan Albert A. Manners, [peng.,] P.M. Laksono, *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Effat Al-Sharqawi, *Filsafat Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka, 1986
- Fred. R. Von der Mohden, "Islam dan Negara di Indonesia dan Malaysia" dalam bukunya Harun Nasution & Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985

- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* [terj.,] Alimandan, dari judul aslinya *Modern Sociological Theory*, edisi Ke-6, Jakarta: Kencana, 2004
- Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam; Teknik Dakwah dan Leadership*, Bandung: Diponegoro, 1992
- Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Heru Nugroho, "Kritik Habermas Terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan", [peng.,] Mohtar Mas'ood, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII-Press, 1997
- Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Jalaluddin Rahmat, *Ilmu Dakwah dan Kaitannya dengan Ilmu-ilmu Lainnya*, Semarang: Seminar, 1990
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991
- \_\_\_\_\_, *Muslim Tanpa Mesjid; Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001
- M. Natsir, *Capita Selecta*, Bandung: N.V. W. van Hoeven, Tanpa Tahun
- Muhammad Quthub, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'rif, 1984
- M. Solly Lubis, *Umat Islam Dalam Globalisasi*, Jakarta: Insani Press, 1997
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Onong Uchjana, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- S. Takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru; Nilai-nilai Sebagai Tenaga Integrasi dalam Pribadi, Masyarakat dan Kebudayaan*, Jakarta: Dian Rakyat, 1966
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Suyuthi Pulungan, *Universalisme Islam*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002

Syamsuddin Arif, “Sains di Dunia Islam: Telaah Historis-Sosiologis”, *Islamia*, “Membangun Peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, Thn I No. 6, Juli-September 2005

Suma Riella Rusdiarti, “Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan”, *Basis*, No. 11-12, Tahun Ke-52, November-Desember 2003

Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, seri terjemahan, Bandung: Mizan, 1998